

Pendampingan Pembuatan Policy Brief bagi ASN Fungsional Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Parepare

**Muh. Tang Abdullah¹, Nurdin Nara², Amril³, Andi Ahmad Yani⁴, Rizal Pausi⁵,
Nuralamsyah⁶**

^{1,2,3,4,5,6} Universitas Hasanuddin, Indonesia

Corresponding Author

Nama Penulis: Muh. Tang Abdullah

E-mail: mtapublikunhas@gmail.com

Abstrak

Dalam menghadapi dinamika kebijakan publik yang semakin kompleks dan cepat berubah, aparatur sipil negara (ASN) fungsional Kota Parepare dituntut untuk mampu merumuskan rekomendasi kebijakan yang tepat, berbasis data, dan komunikatif. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat berbagai tantangan, seperti keterbatasan kemampuan analitis, minimnya pengalaman dalam menyusun dokumen kebijakan yang ringkas, serta rendahnya keterampilan dalam menyajikan pilihan kebijakan secara efektif kepada pengambil keputusan. Permasalahan tersebut bisa diatasi melalui peningkatan kapasitas ASN dengan kegiatan workshop dan pendampingan penyusunan policy brief dirancang untuk membekali ASN dengan keterampilan analisis kebijakan yang tajam, kemampuan merumuskan rekomendasi yang berbasis bukti, serta teknik menulis policy brief yang efektif dan berorientasi pada aksi. Kegiatan workshop ini telah dilakukan pada tanggal 22 Juli 2025 diikuti oleh 20 peserta ASN. Dalam workshop tersebut disajikan materi yang bernuansa konseptual dan praktek teknis pembuatan policy brief secara langsung yang didampingi oleh tim dosen dan mahasiswa dari Fisip Unhas. Untuk mengetahui sejauhmana efektivitas workshop, maka dilakukan metode evaluasi (pre-test dan final-test) untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta terhadap materi workshop. Pada dasarnya pengabdian ini adalah kegiatan LPPM-Unhas, yang dirancang dalam beberapa tahapan. Tahap pertama melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan pihak mitra yakni Bappeda Kota Parepare. Kemudian tahapan berikutnya yakni pelaksanaan workshop dan pendampingan pembuatan policy brief. Pada tahapan yang terakhir yakni kegiatan ekspose (pameran) hasil-hasil dan proses pengabdian yang dilaksanakan di Kota Parepare.

Kata kunci - pengabdian, workshop, policy brief, ASN fungsional, Bappeda Kota Parepare

Abstract

In facing the increasingly complex and rapidly changing dynamics of public policy, the functional civil servants (ASN) of Parepare City are required to be able to formulate appropriate, data-based, and communicative policy recommendations. However, in practice, various challenges remain, such as limited analytical skills, minimal experience in compiling concise policy documents, and low skills in presenting policy options effectively to decision-makers. These problems can be overcome by increasing the capacity of ASN through workshops and mentoring in the preparation of policy briefs designed to equip ASN with sharp policy analysis skills, the ability to formulate evidence-based recommendations, and techniques for writing effective and action-oriented policy briefs. This workshop was held on July 22, 2025, attended by 20 ASN participants. In the workshop, material with conceptual nuances and technical practice of making policy briefs was presented directly, accompanied by a team of lecturers and students from the Faculty of Social and Political Sciences, Hasanuddin University. To determine the effectiveness of the workshop, an evaluation method (pre-test and final-test) was conducted to determine the level of participants' understanding of the workshop material. This community service is essentially an LPPM-Unhas activity, structured in several stages. The first stage involves outreach and coordination with

partners, namely the Parepare City Regional Development Planning Agency (Bappeda). The next stage involves workshops and assistance in developing policy briefs. The final stage is an exhibition of the results and processes of the community service implemented in Parepare City.

Keywords - service, workshop, policy brief, functional ASN, Bappeda Kota Parepare

PENDAHULUAN

Mitra yakni Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Parepare, memiliki pegawai atau Aparatur Sipil Negara (ASN) Fungsional berjumlah 26 orang. Mayoritas ASN tersebut memiliki jabatan dibidang perencanaan pembangunan, yang tentu saja berkaitan erat dengan pembuatan rekomendasi kebijakan yang mendukung setiap perencanaan pembangunan yang dibuat. Oleh karena itu, secara khusus permasalahan mitra dapat diidentifikasi sebagai berikut: (1) Keterbatasan kompetensi teknis oleh asn bappeda parepare. Banyak ASN yang belum terampil dalam merumuskan masalah kebijakan secara ringkas dan fokus, menyusun argumen berbasis bukti yang kuat, dan menulis dalam format dan gaya *policy brief* yang efektif (padat, komunikatif, actionable). (2) Minimnya budaya berpikir kritis dan analitis, ASN sering terbiasa dengan laporan panjang dan normatif, bukan analisis tajam dan pilihan rekomendasi kebijakan. Sulit untuk membedakan antara fakta, asumsi, dan opini dalam menulis rekomendasi. (3) Kurangnya pemahaman tentang *Audience*. Banyak *policy brief* yang dibuat tanpa mempertimbangkan siapa pembacanya (pengambil keputusan), sehingga pesannya tidak efektif. Tidak ada kemampuan untuk menyederhanakan informasi kompleks menjadi sesuatu yang mudah dicerna pimpinan. (4) Keterbatasan akses dan penggunaan data. Masalah dalam mengakses data yang relevan dan mutakhir. Ketidakmampuan mengolah data secara sederhana untuk mendukung rekomendasi. (5) Budaya administratif yang kaku, ASN terbiasa dengan format administrasi formal yang panjang dan bertele-tele. Belum terbiasa dengan format komunikasi kebijakan yang pendek, lugas, dan berbasis argumen. (6) Kurangnya keterampilan dalam menyusun rekomendasi praktis. Sulit mengubah analisis menjadi pilihan kebijakan yang konkret, realistis, dan implementatif. Dan permasalahan terakhir adalah kurangnya kesadaran tentang pentingnya *policy brief*. Banyak yang menganggap *policy brief* tidak penting dibandingkan laporan resmi atau dokumen peraturan. Melihat pentingnya peningkatan kapasitas ini, workshop penyusunan *policy brief* dirancang sebagai solusi untuk membekali ASN dengan keterampilan analisis kebijakan yang tajam, kemampuan merumuskan rekomendasi yang berbasis bukti, serta teknik menulis *policy brief* yang efektif dan berorientasi pada aksi. Workshop penyusunan *policy brief* bagi ASN di Bappeda Kota Parepare, diikuti oleh 20 peserta, yang diseleksi dan ditugaskan oleh Ketua Bappeda untuk mengikuti workshop. Mereka ditentukan berdasarkan tupoksi masing-masing yang berhubungan pembuatan rekomendasi kebijakan kegiatan di bidang penelitian dan pembangunan.

Kontribusi mendasar pada khalayak sasaran. Membekali ASN Bappeda dengan kemampuan mengidentifikasi masalah kebijakan secara tajam, relevan, dan terukur serta melatih ASN untuk berpikir kritis, sistematis, dan berbasis bukti (evidence-based policy making). Membimbing ASN menghasilkan *policy brief* yang singkat, fokus, komunikatif, dan berorientasi solusi serta menyesuaikan format penulisan agar sesuai dengan kebutuhan pimpinan daerah dan pemangku kepentingan lainnya. Mendorong penggunaan data lokal yang aktual (data sektoral, statistik daerah, hasil kajian) dalam memperkuat argumen kebijakan dan mengajarkan teknik sederhana mengolah data menjadi narasi kebijakan yang persuasif. Menumbuhkan kesadaran bahwa *policy brief* bukan hanya produk administratif, melainkan instrumen untuk mendorong perubahan kebijakan dan pembangunan daerah. Juga mengarahkan setiap rekomendasi pada hasil konkret (outcome) yang dapat diukur dan ditindaklanjuti.

METODE

Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah metode workshop dan pendampingan yang berlangsung tidak hanya satu tahapan kegiatan tetapi ada proses

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

pendampingan bersifat tindak lanjut untuk memastikan target tercapai. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam kegiatan Workshop dan Pendampingan Penyusunan *Policy Brief* bagi ASN Fungsional Bappeda Kota Parepare, sebagai berikut :

Langkah 1 yakni: Persiapan dan pengajuan proposal

- a) Pembentukan tim dosen dan mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan
- b) Mengidentifikasi masalah dan merumuskan alternatif solusi
- c) Penyusunan proposal kegiatan
- d) Seminar dan evaluasi proposal

Langkah 2 yakni: Pelaksanaan workshop pengabdian

- a) Bermitra dengan pemerintah daerah (Bappeda Kota Parepare)
- b) Pelaksanaan kegiatan workshop:
 - Workshop berlangsung dua hari dan peserta 20 orang (ASN Bappeda)
 - Ceramah oleh Tim Dosen Fisip Unhas
 - Pendampingan praktek pasca workshop sebanyak 3 kali kegiatan tentang bagaimana pembentukan *policy brief*.

Langkah 3 yakni: Evaluasi (pre-test dan final test) dan pembuatan laporan

- a) Laporan kemajuan/akhir, laporan keuangan, logbook kegiatan,
- b) Publikasi media massa elektronik
- c) Penyusunan artikel dan tersubmit pada jurnal pengabdian masyarakat dan prosiding nasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian masyarakat Unhas kali ini, pada dasarnya dilaksanakan dalam beberapa tahapan. Tahapan yang dimaksud meliputi (1) tahap sosialisasi dan koordinasi dengan pihak mitra; (2) tahap pelaksanaan workshop dan (3) tahap ekspose (pameran) kegiatan dan hasil pengabdian secara kolektif. Sebelum pelaksanaan *workshop policy brief* berlangsung, sebelumnya telah dilakukan tahap sosialisasi dan koordinasi dengan pihak mitra Bappeda Kota Parepare yakni pada tanggal 17 Juli 2025. Pada tahapan awal ini tim diterima oleh Kabid Litbang Bappeda dan beberapa staf pegawai, yang menyepakati waktu, tempat, dan peserta pelaksanaan workshop. Kemudian tim pengabdian kepada masyarakat Universitas Hasanuddin (UNHAS) mengadakan *workshop & pendampingan penyusunan policy brief bagi ASN Fungsional* Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA). Kegiatan ini berlangsung pada tanggal 22 Juli 2025, di aula kantor Bappeda, Jl. Jenderal Sudirman No.80, Cappa Galung, Kec. Bacukiki Barat Kota Parepare.

Kegiatan workshop *policy brief* ini direncanakan hanya mengundang 20 peserta, namun karena dianggap penting penulisan *policy brief* dikalangan ASN secara umum, maka diikuti oleh 27 peserta ASN Fungsional yang tidak hanya dari Bappeda tapi juga dari SKPD lain. Semula workshop dirancang berlangsung selama 2 hari, namun karena pertimbangan teknis, maka hanya dilakukan sehari saja. Konsekuensinya, materi-materi workshop dipadatkan dan lebih banyak pada praktek secara langsung, bagaimana menyusun *policy brief* secara cepat dan efektif. Dalam praktek langsung penyusunan *policy brief*, peserta dibagi dalam beberapa kelompok dan didampingi oleh tim dan mahasiswa yang kebetulan terlibat dalam pengabdian ini. Selanjutnya, sebagai tindak lanjut dalam penyusunan *policy brief* tersebut, disepakati untuk pendampingan dan konsultasi bagi peserta dilakukan secara online dengan anggota tim pendampingan mereka masing-masing.

Jadwal & Materi Workshop dan Pendampingan Penyusunan Policy Brief				
Hari/Tgl	Waktu	Agenda Kegiatan	Metode	Penanggung Jawab
27 Juli '25	08.00 – 08.30	Registrasi dan Pembukaan	Registrasi dan sambutan	Panitia & TIM
	08.30 – 09.15	Pengenalan Policy Brief dan Perannya dalam Kebijakan Publik	Ceramah interaktif	Dr. Muh. Tang Abdullah, M.AP
	09.15 – 10.00	Mengenal Masalah Kebijakan dan Analisis Awal	Diskusi kelompok kecil	Dr. Nurdin Nara, M.Si
	10.00 – 10.15	Coffee Break	-	Panitia
	10.15 – 11.30	Struktur dan Format Policy Brief	Ceramah + Tanya Jawab	Andi Ahmad Yani, S.Sos., M.Sc. MPA
	11.30 – 12.30	Latihan Menyusun Latar Belakang dan Rumusan Masalah	Praktik individu	Nuralamsyah Ismail, S.Sos., MA (Fasilitator)
	12.30 – 13.30	Istirahat Makan Siang	-	Panitia
	13.30 – 15.00	Penggunaan Data dan Teknik Menulis yang Efektif	Ceramah + Contoh kasus	Dr. Amril, SAP., MPA
	15.00 – 16.30	Praktik Menyusun Kerangka Policy Brief	Kerja kelompok	Rizal Pauzi, S.Sos., M.Si (Fasilitator)
	16.30 – 17.00	Refleksi dan Penutupan Hari Pertama	Diskusi & Catatan Kunci	Moderator

Gambar 2.
Jadwal dan Materi Workshop

Sebagaimana lazimnya, sebuah workshop yang tentu saja bertujuan memberikan wawasan dan pengetahuan serta teknis penyusunan *policy brief*, dilakukan penilaian dan evaluasi pada tahap pra-workshop dan pasca-workshop. Evaluasi ini dimaksudkan untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta terhadap materi workshop yang diberikan pada saat itu. Hasil evaluasi pada pra-workshop ternyata hanya 40% dari peserta yang cukup mengetahui dan 60% dari peserta kurang mengetahui materi-materi yang diberikan. Namun, diakhir evaluasi (pasca-workshop) evaluasi menunjukkan adanya peningkatan secara signifikan pengetahuan peserta terhadap materi yang diberikan. Hasil evaluasi menunjukkan sudah terdapat 80% peserta yang cukup mengetahui dan 20 % yang masih kurang mengetahui dan memahami materi yang berikan dalam *workshop policy brief* ini.



Gambar 3.
Foto Koordinasi pelaksanaan pengabdian (waktu, tempat & peserta)



Gambar 4.
Foto Pelaksanaan pengabdian workshop policy brief

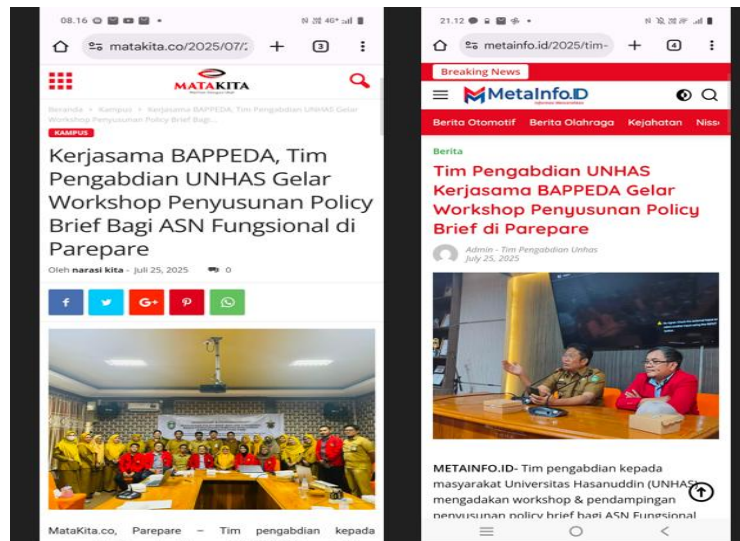


Gambar 5.

Foto Pelaksanaan ekspose (pameran) pengabdian di rujab walikota Parepare

Luaran dari kegiatan pengabdian ini, meliputi luaran wajib:

- (1) Publikasi ilmiah berupa artikel di jurnal nasional terakreditasi (ber-ISSN) masih dalam bentuk draft artikel yang akan disubmit pada jurnal:
<https://ejournal.jurnalpengabdiansosial.com/index.php/jps>
- (2) Publik di media massa cetak atau online.



Gambar 6.

Artikel di media massa cetak

Beritanya dapat dilihat pada link berikt ini:

<https://matakita.co/2025/07/25/kerjasama-bappeda-tim-pengabdian-unhas-gelar-workshop-penyusunan-policy-brief-bagi-asn-fungsional-di-parepare/>

<https://metainfo.id/2025/tim-pengabdian-unhas-kerjasama-bappeda-gelar-workshop-penyusunan-policy-brief-di-parepare/>

- (3) Karya audio-visual berbentuk-video, luaran ini sudah ada dan dipamerkan (ditampilkan) pada saat kegiatan ekspose (pameran) pengabdian Unhas di Aula Rumah Jabatan Walikota Parepare pada tanggal 29 September 2025.

- (4) Karya visual berbentuk poster (x-banner), luaran ini juga sudah ada dan dipamerkan (ditampilkan) pada saat kegiatan ekspose (pameran) hasil pengabdian Unhas di Aula Rumah Jabatan Walikota Parepare pada tanggal 29 September 2025 yang lalu.

Luaran dari kegiatan pengabdian ini, meliputi luaran tambahan:

Peningkatan kualitas tata kelola pembangunan wilayah (kelengkapan kualitas organisasi formal dan non formal/kelompok-kelompok di wilayah, tingkat penggunaan IT, kelengkapan standar prosedur pengelolaan). Untuk memenuhi luaran tambahan ini, maka dilakukan strategi evaluasi terhadap tingkat pengetahuan dan wawasan peserta mengenai materi-materi workshop *policy brief* yang disajikan.

Setelah dilakukan proses evaluasi baik pada awal workshop (Pra-Test) dan evaluasi akhir workshop (Final-Test), maka diperoleh gambaran hasil penilaian peningkatan pengetahuan dan wawasan peserta yang sangat signifikan, sebagai berikut dalam tabel 2.

No.	Materi Pelatihan Workshop	Tanggapan Peserta (Tingkat Perubahan)						Ket.
		Mengetahui		Cukup Mengetahui		Tidak Mengetahui		
		P-Test	F-Test	P-Test	F-Test	P-Test	F-Test	
1.	<i>Policy Brief</i> & Kebijakan Publik	6 %	82 %	51 %	8 %	43 %	0 %	***
2	Masalah Kebijakan & Analisis Awal	25 %	86 %	29 %	14 %	66 %	0 %	***
3.	Struktur & Format <i>Policy Brief</i>	57 %	97 %	29 %	3 %	14 %	0 %	***
4.	Menyusun Latarbelakang & Rumusan Masalah	6 %	94 %	14 %	6 %	80 %	0 %	***
5.	Praktek Pembuatan <i>Policy Brief</i>	34 %	88 %	26 %	12 %	40 %	0 %	***
Rata-Rata		22%	90 %	30%	10 %	48%	0%	***

***Terjadi peningkatan pemahaman peserta secara signifikan

Realisasi kerjasama dan kontribusi mitra (Bappeda Kota Parepare dalam kegiatan pengabdian ini sangat nyata dan membentuk dalam pelaksanaan pengabdian. Kontribusinya berupa *in-kind* dalam wujud menyiapkan ruang berserta sarana peralatan yang dibutuhkan dalam workshop, menyediakan konsumsi (nasi dan sneck) sebanyak 40 dos. Selain itu mitra juga cukup aktif memberi informasi dan menyeleksi peserta workshop.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian masyarakat ini pada dasarnya tidak menghadapi kendala yang begitu berat. Hambatan pelaksanaan kegiatan lebih pada pada sulitnya menentukan waktu yang tepat sehingga semua pihak dapat berpartisipasi secara penuh. Demikian pada saat berlangsungnya

workshop, kendala tepat waktu bagi peserta yang berasal dari tempat yang relatif jauh dari lokasi kegiatan. Berkaitan dengan luaran yang dijanjikan terutama luaran wajib yakni artikel pengabdian terpublikasi kendala utamanya adalah waktu penerbitan jurnal yang kemungkinan akan menyeberang ke tahun berikutnya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kegiatan pengabdian ini tentu saja tidak dapat terealisasi, tanpa dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu sepatutnya diucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Hasanuddin atas program dan fasilitasi pendanaan skema pengabdian tahun 2025 ini. Juga kepada Ketua Bappeda Kota Parepare dan seluruh staf yang menjadi mitra dan berkontribusi atas suksesnya pengabdian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). (2021). *Panduan penulisan policy brief ilmiah*. Jakarta: BRIN Press.
- Dunn, W. N. (2003). *Analisis kebijakan publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Lembaga Administrasi Negara. (2017). *Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah bagi Analis Kebijakan*.
- Pemerintah Kota Parepare. (2024). *Kota Parepare dalam angka tahun 2024*. Badan Pusat Statistik.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2011). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*.
- Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada (PSKK UGM). (2019). *Buku panduan penulisan policy brief untuk akademisi dan peneliti*. Yogyakarta: PSKK UGM.
- Suharto, E. (2010). *Analisis kebijakan publik: Panduan praktis mengkaji masalah dan kebijakan sosial*. Bandung: Alfabeta.
- The SMERU Research Institute. (2018). *Panduan penulisan policy brief untuk riset kebijakan sosial*. Jakarta: SMERU.
- Topatimasang, R., et al. (2007). *Mengubah kebijakan publik*. Yogyakarta: INSIST Press.
- United Nations Development Programme (UNDP). (2014). *Guidelines for writing policy briefs*. New York: United Nations Development Programme.
- Wahab, S. A. (2012). *Analisis kebijakan: Dari formulasi ke penyusunan model-model implementasi kebijakan publik*. Jakarta: Bumi Aksara.